

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat (AS) adalah negara berdaulat yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan setidaknya 200 negara di seluruh dunia termasuk Iran salah satunya. Tujuan AS menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara untuk melancarkan kepentingan ekonomi, politik dan keamanan negaranya. Namun, hubungan diplomatik antara AS dengan Iran tidak berjalan mulus. Hubungan kedua negara mengalami pasang surut hingga puncaknya hubungan diplomatik antara AS dengan Iran terputus. Namun, hubungan diplomatik kedua negara sempat membaik ketika Barack Obama diangkat menjadi presiden AS yang ke-44. Salah satu alasan membaiknya hubungan kedua negara karena selama kepemimpinan Obama, fokus kebijakan luar negerinya adalah multilateralisme dengan menggunakan diplomasi *soft power* (Mutiarah Bahari & Sahide, 2022).

Pada masa kepemimpinan Barack Obama, AS membuat kebijakan bernama *Joint Comprehensive Plan of Action* atau JCPOA yaitu sebuah perjanjian antara Iran dengan negara kelompok P5 + 1 yaitu AS, Tiongkok, Rusia, Perancis, Inggris dan Jerman dengan maksud agar Iran dapat mengurangi dan membatasi pengayaan nuklirnya sebesar dua pertiga dari total kapabilitas nuklirnya dan melakukan pemberhentian fasilitas pengayaan uraniumnya hingga tahun 2030 (Shafar & Mutmainah, 2020). Perjanjian ini penting bagi Iran karena sebagai ganti dari pengurangan dan pembatasan program nuklir tersebut, sanksi-sanksi terkait program nuklir Iran oleh negara-negara kelompok P5+1 dan beberapa sanksi internasional lainnya akan dicabut (Shafar & Mutmainah, 2020). Akhirnya setelah melalui negosiasi yang panjang, Iran menyepakati perjanjian ini. Hal ini juga yang mengantarkan Iran pada pembebasan sanksi ekonomi yang juga menandai hubungan baik antara kedua negara.

Namun, ketika AS dipimpin oleh Donald Trump, hubungan kedua negara tidak lagi membaik. Hubungan antara AS - Iran semakin diperparah ketika pada tanggal 8 Mei 2018 Donald Trump menandatangani memorandum presiden yang menyatakan bahwa AS keluar dari kesepakatan JCPOA (Violina Krismayanti et al., 2022). Menurut Trump, perjanjian JCPOA hanya merugikan AS. AS juga kembali memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Sanksi ekonomi yang diberikan AS kepada Iran membuat kondisi ekonomi

Iran memburuk, produksi minyak dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) runtuh dan mata uang Iran melemah serta inflasi yang meningkat (Abdillah, 2019). Semenjak saat itu, hubungan kedua negara berada pada posisi saling berseteru.

Klimaksnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 pada pukul 12.47 waktu setempat, di bawah perintah Donald Trump, Jenderal Qassem Soleimani – tokoh militer elite Iran – tewas terbunuh akibat serangan udara nirawak milik AS di wilayah Bandara Internasional Baghdad di Irak (Cambridge University Press, 2020). Kematian Soleimani menyita perhatian masyarakat Iran karena Soleimani adalah pahlawan militer nasional dan pelindung religius yang membantu perjuangan Palestina dan menentang Israel (Guerra, 2021). Soleimani juga dikenal akan popularitasnya dalam menggaungkan perlawanan keras terhadap AS, Israel dan koalisi pendukung serta berbagai kepentingan mereka di Timur Tengah dan Afrika Utara (Agustina & Finaldin, 2020). Tidak hanya masyarakat Iran, kematian Soleimani juga mengejutkan dunia internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara kawasan.

Sikap AS di bawah perintah Donald Trump yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Soleimani mendapat sorotan dunia internasional sehingga perlu diketahui alasan yang melatarbelakangi Donald Trump melakukan aksi pembunuhan terhadap Soleimani.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, timbul pertanyaan **“Mengapa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump melakukan aksi pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah salah satu bidang pembelajaran dalam studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena melibatkan aspek-aspek eksternal dan aspek-aspek internal suatu negara (Rosenau, 1976). Setiap negara memiliki politik luar negeri yang berbeda-beda tergantung pada tujuan nasionalnya. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri merupakan unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meski terdapat juga aktor-aktor non-negara lainnya yang berada di dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal sebagai *input* yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau, 1980).

Secara umum, faktor-faktor internal yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara antara lain adalah faktor historis, geografis, demografis, sistem politik, cara pandang aktor-aktor politik terhadap sistem internasional serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara tersebut (Triwahyuni, 2011). Lebih daripada itu, faktor internal yang mempengaruhi politik luar negeri adalah sistem pemerintahan suatu negara, keadaan wilayah, tujuan nasional suatu negara, kepentingan nasional dan ideologi bangsa. Selain itu, pergantian kepemimpinan pemerintahan juga mempengaruhi politik luar negeri karena pada hakekatnya, setiap pemimpin memiliki kebijakan dan tujuan nasional tersendiri terhadap politik luar negerinya (Triwahyuni, 2011). Sedangkan, secara eksternal, faktor yang mempengaruhi politik luar negeri salah satunya adalah globalisasi. Dengan semakin masifnya perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang cepat, tentunya memudahkan masyarakat sekaligus pemerintah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di negara lain.

Dalam memahami politik luar negeri, perlu diketahui bahwa politik luar negeri termasuk ke dalam *action theory* atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri atau *foreign policy* merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Yani, n.d.).

Miriam Budiardjo berpendapat mengenai politik luar negeri sebagai kebijakan (*policy*) merupakan sebuah kumpulan yang ditetapkan oleh pelaku atau kelompok sebagai usaha yang memiliki tujuan di mana kebijakan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 1995).

Selain Miriam Budiardjo, terdapat juga konsep politik luar negeri yang dikemukakan oleh Mappa Nasrun yang mengatakan bahwa politik luar negeri suatu

negara pada hakikatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang juga menentukan perilaku politik luar negeri. Jadi, politik luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nasrun, 1990).

Salah satu cara untuk memahami politik luar negeri adalah dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu politik dan luar negeri. Politik atau *policy* adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik (*policy*) sendiri berakar pada konsep pilihan atau *choices*: Memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan luar negeri berkaitan dengan kedaulatan dan konsep “wilayah”. Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam negeri) yang dimiliki suatu negara. Dari kedua konsep di atas dapat ditarik penjelasan bahwa politik luar negeri berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam memberikan batasan tentang politik luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan suatu politik luar negeri. Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Oleh sebab itu, politik luar negeri dapat diartikan sebagai sebuah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor hubungan internasional lain.

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tentunya terdapat sumber-sumber utama dari politik luar negeri. James N. Rosenau mengkategorikan faktor-faktor atau sumber-sumber politik luar negeri melalui dua kontinum yaitu dengan cara menempatkan sumber-sumber tersebut ke dalam kontinum waktu (*time continuum*) dan kontinum agresi sistematis (*systemic aggregation continuum*) (Rosenau et al., 1976). Kontinum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat tetap dan berlaku terus menerus (*sources that tend to change slowly*), sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*short-term fluctuations*) dan sumber-sumber yang dapat berubah (*sources that tend to undergo rapid change*).

Adapun sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri di antaranya adalah:

1. Sumber sistemik (*systemic sources*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara seperti hubungan antar negara, aliansi dan faktor situasional eksternal berupa isu-isu lainnya. Maksud dari faktor situasional eksternal adalah stimulan tiba-tiba yang berasal dari keadaan internasional saat ini;
2. Sumber masyarakat (*societal sources*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial dan juga opini publik;
3. Sumber pemerintah (*governmental sources*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan internal yang menjelaskan pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintah; serta
4. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), yaitu sumber yang berasal dari internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat juga kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri (Rosenau et al., 1976).

Dikarenakan politik luar negeri adalah cerminan dari kondisi internal dan eksternal suatu negara, maka politik luar negeri bersifat dinamis. Hal ini juga terlihat jelas pada politik luar negeri AS yang bersifat dinamis dalam menghadapi dunia internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Reni, 2010). Adapun kepentingan nasional AS sendiri ialah untuk melindungi wilayah, warga negara, pendapatan dan sekutu AS. Kebijakan yang dibuat pun dinamis tergantung pada pembuat kebijakannya.

Aktor-aktor pembuat kebijakan luar negeri AS dalam bidang militer terdiri dari presiden dan kongres. Sedangkan terdapat juga badan pendukung dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS yang terdiri dari departemen luar negeri, *Central Intelligence Agency* (CIA), departemen pertahanan dan kekuatan militer AS. Meski begitu, presiden bebas untuk melakukan negosiasi terkait perjanjian yang akan dibuat, namun perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga dari anggota Senat (Avianda, 2017). Kebijakan luar negeri AS merupakan permasalahan yang krusial dikarenakan dalam perumusannya tidak dapat diputuskan oleh hanya satu pihak saja, melainkan melibatkan seluruh pihak. Aktor-aktor yang terlibat ini nantinya akan memiliki peran dan pengaruh masing-masing dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar

negeri AS. Dalam kasus pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani, kebijakan yang diputuskan oleh Donald Trump telah melalui proses pengambilan keputusan yang panjang. Sebelum aksi pembunuhan pada tanggal 3 Januari 2020, AS mendapatkan informasi dari salah seorang jenderal militer AS Mark Milley yang menyebutkan bahwa Qassem Soleimani tengah merencanakan sebuah tindakan kekerasan terhadap warga negara AS yang berada di Irak (Asmara, 2020). Kepada pers, Milley mengatakan bahwa “AS sepenuhnya memahami konsekuensinya. Namun apabila AS tidak mengambil tindakan, akan berisiko terhadap keamanan warga negaranya”. Pentagon juga menjelaskan bahwa serangan *drone* dimaksudkan untuk pencegahan terhadap aksi yang akan dilakukan Soleimani. Meski terdapat pula pihak yang kontra dengan keputusan Trump untuk membunuh Soleimani seperti Menteri Pertahanan AS Mark Esper, namun Esper mengakui setuju bahwa serangan terhadap Keduataan Besar AS mungkin saja dapat terjadi (Raharjo, 2020).

Pada prinsipnya, apa yang *founding fathers* AS inginkan adalah sebuah dunia unipolar di mana AS “*Imposes the rules but because of its own self-evident goodness is not necessarily bound by them*” dan boleh bertindak secara sepihak, jika tindakan sepihak itu dapat melayani kepentingan nasional AS (Yuliantoro, 2005). Ini pula kemudian yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Presiden Trump dalam menewaskan Jenderal Qassem Soleimani.

## 2. Konsep Idiosinkratik

Pendekatan-pendekatan tradisional dalam hubungan internasional sering kali tidak dapat menjawab mengenai tingkah laku aktor politik dalam mengambil sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, psikologi politik hadir untuk membantu menjelaskan mengenai perilaku politik seorang pemimpin yang didasarkan pada ilmu psikologi dan ilmu politik (Cottam, 2004). Dibantu oleh ilmu psikologi dalam menganalisa dunia politik, peneliti dapat lebih mengerti pemimpin politik berdasarkan kepribadiannya. Menurut Hermann, secara umum psikologi politik meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dipengaruhi oleh kepribadiannya (Hermann, 1980). Pada buku yang berjudul “*Introduction of Political Psychology*” karya Martha Cottam, dijelaskan bahwa setiap individu memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda dan keunikan masing-masing yang mana kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal (Cottam, 2004). Dalam sebuah negara, pemimpin adalah pemegang

kekuasaan tertinggi sehingga ia memiliki kontrol untuk mengatur kebijakan dan perilaku sebuah negara (Mintz, 2010).

Secara garis besar, idiosinkratik adalah karakter atau kepribadian yang biasanya juga disebut dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Batubara et al., 2021). Konsep idiosinkratik lahir dari ilmu psikologi yang menjelaskan bahwa kepribadian seorang individu pada tingkah lakunya mempengaruhi kehidupan sehari-harinya termasuk apabila ia seorang pemimpin maka dapat juga berpengaruh terhadap kebijakan atau politik suatu negara (Batubara et al., 2021). Hal ini selaras juga dengan studi yang dilakukan oleh Greenstein dan Winter yang mengatakan bahwa “Pada keadaan tertentu, karakter pribadi seseorang – dalam hal ini tokoh internasional – memiliki peran penting dalam menghasilkan sebuah kebijakan” (Dyson, 2006).

Renshon menjelaskan bahwa karakter adalah pondasi dasar pada struktur kepribadian seorang individu dalam berkembang dan beroperasi (Wayne, 2011). Oleh karenanya, karakter seseorang akan terlihat ketika ia mengambil sebuah keputusan pun juga ketika bertingkah laku, seseorang akan bertindak berdasarkan pada keputusan yang dia ambil (Batubara et al., 2021). Berdasarkan studi yang dilakukan Hermann, kepribadian pemimpin dapat dilihat pada gaya pengambilan keputusan serta gaya interpersonalnya terlepas di mana ia berada. Bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan dan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan yang lain juga akan terbawa pada perilaku politiknya (Hermann, 1980). Maka dari itu, kepribadian atau karakter seorang pemimpin menjadi kunci ketika pemimpin tersebut merumuskan politik luar negeri (Batubara et al., 2021).

Lebih lanjut, menurut (Anugerah, 2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri” terdapat setidaknya 5 faktor idiosinkratik seorang pemimpin yaitu:

1. Latar belakang keluarga, yaitu latar belakang yang meliputi status sosial keluarga, keadaan perekonomian keluarga dan hubungan sosialnya dengan masyarakat;
2. Latar belakang pendidikan, yaitu latar belakang yang meliputi pendidikan seorang pemimpin seperti di mana sekolahnya berada dimulai dari sekolah dasar hingga pendidikan ke jenjang yang tinggi;

3. Pengalaman dan pembelajaran seorang pemimpin yang merupakan produk dari dinamika dalam kehidupan sosialnya, dari kecil hingga dewasa;
4. Afiliasi pemimpin, maksudnya persepsi pemimpin sangat dibentuk oleh ideologi dan kepentingan yang direkomendasikan oleh partai politik tempat pemimpin tersebut bernaung; dan
5. Produksi pengetahuan, yaitu berhubungan dengan *background* kehidupan sosial dan *background* pendidikan, akan tetapi lebih spesifik pada bagaimana pemimpin menyerap informasi yang didapatnya menjadi persepsi, pola pikir dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan (Anugerah, 2016).

Dalam kasus pembunuhan Soleimani yang dilakukan oleh Trump dipengaruhi oleh kelima faktor idiosinkratik di atas yang mana latar belakang keluarga Trump sebagai seorang pebisnis menjadikannya memperhitungkan *cost* yang diambil, selain itu di sisi lain faktor pendidikan Trump yang pernah bersekolah di *New York Military Academy* menjadikan Trump sebagai sosok yang agresif dan tegas. Pengalaman dan pembelajaran Trump semasa kecil hingga dewasa membuat Trump memiliki keyakinan yang tinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lebih lanjut, afiliasi pemimpin yang mana Trump berasal dari Partai Republik yang memiliki ideologi neo-konservatif juga telah berpengaruh terhadap kebijakan yang ia ambil. Produksi pengetahuan yang didapat Trump terkait *track record* Soleimani sebagai pemimpin dari Pasukan Quds juga ikut meyakinkan Trump untuk mengambil keputusan membunuh Soleimani.

#### **D. Hipotesis**

AS di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan aksi pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani karena adanya faktor idiosinkratik Trump yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman dan pembelajaran seorang pemimpin yang merupakan produk dari dinamika dalam kehidupan sosialnya, afiliasi pemimpin dan produksi pengetahuannya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk melihat alasan yang melatarbelakangi mengapa Donald Trump melakukan aksi pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis eksplanatif. Menurut Sugiyono, penelitian eksplanasi (*explanatory research*) adalah tipe penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013).

### **2. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan berasal dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara atau dokumen yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dibahas dengan berdasar pada fakta-fakta yang ada (Sugiyono, 2018).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan telaah pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, dokumen maupun artikel yang didapatkan dari perpustakaan. Selain itu, terdapat juga situs-situs internet yang menyediakan *e-book*, *e-journal* dan media cetak online yang berskala nasional maupun internasional.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif merupakan teknik analisis berupa mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017).

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini, jangkauan penelitian yang diambil ialah dimulai dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45 yaitu pada tahun 2017 hingga 3 Januari 2020. Alasan dipilihnya rentang tahun ini dikarenakan pada tahun 2017, Donald Trump diangkat menjadi presiden Amerika Serikat. Sedangkan tanggal 3 Januari 2020 Jenderal Qassem Soleimani tewas akibat serangan

udara tanpa awak yang diluncurkan Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad, Irak atas perintah Donald Trump.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penelitian ini, terdapat empat bab yang di antaranya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab satu akan membahas mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan terkait dinamika hubungan antara AS dan Iran yang mengalami pasang surut hingga pada akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani atas perintah Donald Trump. Selanjutnya akan disertakan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Bab dua akan membahas mengenai Dinamika Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Pembahasan akan dimulai dengan menceritakan dasar-dasar kepentingan politik luar negeri AS di Timur Tengah, sejarah hubungan AS – Iran, politik luar negeri AS terhadap Iran pada era Trump hingga menjelaskan mengenai deskripsi pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani.

**BAB III** Bab tiga akan membahas mengenai Pengaruh Idiosinkratik Donald Trump dalam Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani. Pembahasan akan dimulai dengan menceritakan latar belakang kehidupan Trump sebelum menjadi presiden AS hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS yang ke-45. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kepribadian Donald Trump melalui lima faktor idiosinkratik yang sebelumnya sudah dijelaskan di kerangka pemikiran.

**BAB IV** Bab empat akan membahas mengenai penutup yang berisi temuan hasil dari penelitian dan analisis pembahasan, lalu dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.